



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARRIDEL MINDRA**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **111061**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah Seluas 4.5 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 4.5 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 649.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOBIL, TOYOTA SEDAN ALTIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 27.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.623.900.098
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	7.439.900.098
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.439.900.098

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.